



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Data Pokok Pendidikan dalam Pemetaan Kelinearitas Guru Muatan Lokal Bahasa Bali serta Seni Budaya pada Satuan Pendidikan

Ni Putu Angara Wati^{1*}, I Made Yudana², Ni Luh Gede Erni Sulindawati³

¹Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia, angara@student.undiksha.ac.id

²Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia, made.yudana@undiksha.ac.id

³Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia, erni.sulindawati@undiksha.ac.id

*Corresponding Author: angara@student.undiksha.ac.id

Abstract: *This study aims to analyse the role of Basic Education Data (Dapodik) in mapping the eligibility of teachers with local content of Balinese Language and Cultural Arts in educational units. Teacher brilliance is an important indicator in ensuring the quality of learning based on local wisdom, because the suitability of the educational background with the subjects taught has a direct effect on the effectiveness of learning. This research uses a qualitative descriptive approach with data sources in the form of Dapodik documents and regional education policies. Data analysis was carried out through the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2020), which includes data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of the study show that Dapodik plays a strategic role in providing valid data on the distribution of teachers, educational backgrounds, and the suitability of the field of expertise with local content subjects. However, the level of teacher competence is still low, as many teachers assigned to teach Balinese Language and Cultural Arts do not have appropriate educational backgrounds. This study concludes that the integration between Dapodik data and regional education policies is needed to increase the effectiveness of teacher career mapping. The existence of Dapodik not only supports the governance of educational administration but also contributes to the preservation of local culture through improving the quality of learning.*

Keywords: *Dapodik, Teacher Craftsmanship, Local Content, Balinese Language, Cultural Arts, Learning Quality*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam pemetaan kelinieritas guru muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya pada satuan pendidikan. Kelinearitas guru menjadi indikator penting dalam menjamin kualitas pembelajaran berbasis kearifan lokal, karena kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa dokumen Dapodik dan kebijakan pendidikan daerah. Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dapodik berperan strategis dalam menyediakan data valid mengenai distribusi guru, latar belakang pendidikan, serta kesesuaian bidang keahlian dengan mata pelajaran muatan lokal. Namun, tingkat kelinieritas guru masih rendah, di mana banyak guru yang ditugaskan mengajar Bahasa Bali dan Seni Budaya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara data Dapodik dan kebijakan pendidikan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemetaan kelinieritas guru. Keberadaan Dapodik tidak hanya mendukung tata kelola administrasi pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal melalui peningkatan kualitas pembelajaran.

Kata Kunci: Dapodik, Kelinieritas Guru, Muatan Lokal, Bahasa Bali, Seni Budaya, Kualitas Pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam upaya bangsa mewujudkan cita-cita luhur untuk memperbaiki nasib serta menata masa depan yang lebih baik. Melalui proses pendidikan yang terarah, diharapkan lahir generasi yang memiliki kemandirian, daya kritis, dan kemampuan berpikir rasional. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk insan yang cerdas, kreatif, sabar, serta memiliki daya saing tinggi sehingga siap menghadapi dinamika perubahan dan tantangan yang terus berkembang di berbagai aspek kehidupan (Dharmawan & Mandiasa, 2021). Proses penyelenggaraan pendidikan dalam pembentukan perilaku peserta didik memiliki hubungan kausalitas; masing-masing institusi sama-sama berperan dan memiliki hubungan timbal balik di antara lembaga penyelenggara pendidikan.

Transformasi digital di bidang pendidikan ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan memperbaiki efisiensi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam proses tersebut, aspek yang sangat menentukan adalah pengelolaan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang harus disajikan secara akurat, terintegrasi, serta dapat diakses dengan mudah untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Ramadhan & Riyadi, 2025).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara berkelanjutan berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi pendidikan nasional yang dikenal dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik dirancang sebagai sistem berbasis web yang terintegrasi, memuat informasi komprehensif mengenai peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, hingga perguruan tinggi. Kehadiran sistem ini ditujukan untuk menyediakan data pendidikan yang valid, lengkap, dan mudah diakses, sehingga dapat menjadi landasan dalam proses pengambilan kebijakan serta pengelolaan program pendidikan. Pada akhirnya, Dapodik diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang cerdas, berdaya saing, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global (Arfin et al., 2025).

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hadir sebagai sistem pendataan nasional yang mampu memetakan kondisi riil guru di sekolah. Melalui Dapodik, pemerintah dapat mengidentifikasi jumlah guru muatan lokal, latar belakang pendidikan, serta distribusi di berbagai jenjang. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa Dapodik tidak hanya berfungsi sebagai basis data administratif, tetapi juga sebagai alat analisis kebijakan pendidikan untuk memastikan kelinieritas guru dengan mata pelajaran yang diampu. Penelitian kebijakan pendidikan menegaskan bahwa muatan lokal merupakan bagian integral dari kurikulum yang harus diimplementasikan sesuai potensi daerah, sehingga keberadaan guru yang kompeten menjadi faktor penentu keberhasilan (Sugianti et al., 2022).

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dirancang dengan konsep dasar yang bersifat *relasional* dan *longitudinal*. Hal ini memungkinkan program pembangunan pendidikan dapat diarahkan secara lebih sistematis serta memudahkan proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang merata dan sesuai kebutuhan. Sebagai sumber data nasional, Dapodik dituntut memiliki karakteristik yang selalu diperbarui, valid, reliabel, sah secara resmi, serta komprehensif. Tujuan utama dari keberadaan Dapodik sebagai basis data tunggal adalah menyediakan gambaran nyata mengenai kondisi pendidikan di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan (Arfin et al., 2025).

Pendidikan yang berlandaskan kearifan lokal menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan identitas budaya bangsa. Di Provinsi Bali, mata pelajaran muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya menempati posisi penting sebagai sarana pelestarian bahasa, aksara, karya sastra, serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui implementasi muatan lokal, sekolah tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai medium pewarisan nilai budaya (Semadi, 2021). Pemerintah Provinsi Bali, sebagai salah satu pemerintahan daerah yang menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan bahasa Bali, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pembelajaran bahasa daerah tersebut. Upaya ini senantiasa diarahkan agar selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tercipta kesinambungan antara regulasi nasional dan implementasi di tingkat lokal. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah daerah Bali, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, yang secara konsisten menempatkan pelestarian bahasa Bali sebagai prioritas dalam agenda pendidikan. (Wisnu et al., 2023).

Meski demikian, tantangan yang dihadapi satuan pendidikan cukup kompleks, terutama terkait dengan ketersediaan tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Banyak guru berlatar belakang pendidikan umum ditugaskan untuk mengajar bahasa Bali maupun seni budaya, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian kompetensi dan berdampak pada kualitas proses pembelajaran. Studi mengenai pemberdayaan guru Bahasa Bali menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menyediakan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum muatan lokal. Guru kontrak daerah sering kali ditugaskan tanpa mempertimbangkan kesesuaian latar belakang akademik, sehingga berdampak pada efektivitas pembelajaran (Wisnu et al., 2023). Selain itu, penelitian tentang kelayakan buku ajar muatan lokal Bahasa Bali menegaskan bahwa kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi guru dalam mengintegrasikan aspek komunikasi, edukasi, dan kultural (Parwati, 2023).

Selain itu, kajian mengenai pembelajaran Bahasa Bali menunjukkan bahwa alokasi waktu yang sangat terbatas, yaitu sekitar dua jam per minggu tidak sebanding dengan keluasan materi yang harus mencakup aspek bahasa, aksara, dan sastra Bali. Kurikulum yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan kompetensi baik bagi guru maupun peserta didik. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sebagian besar guru muatan lokal tidak memiliki latar belakang akademik yang relevan, sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas proses pembelajaran (Semadi, 2021). Oleh karena itu, kebutuhan untuk melakukan pemetaan kelinieritas guru melalui sistem Dapodik menjadi semakin mendesak.

Dari sudut pandang manajemen pendidikan, pemetaan kelinieritas guru memiliki pengaruh langsung terhadap mutu proses pembelajaran. Guru yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan bidang yang diajarkan umumnya lebih mampu mengintegrasikan dimensi komunikasi, edukasi, dan budaya dalam kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, ketidaklinieran antara kompetensi guru dan mata pelajaran yang diampu berpotensi menghasilkan pembelajaran yang dangkal serta kurang sejalan dengan tujuan kurikulum muatan lokal. Atas dasar itu, penelitian ini dilandasi oleh urgensi untuk mengetahui bagaimana

peran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam memetakan kelinieritas guru pada mata pelajaran muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengkaji peran Dapodik dalam pemetaan kelinieritas guru muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pendidikan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis kearifan lokal dan memperkuat identitas budaya Bali di satuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam pemetaan kelinieritas guru muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya pada satuan pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian pendidikan di Indonesia (Moleong, 2019). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Rahayu, 2020).

Fokus Penelitian

Subjek penelitian meliputi guru dan tenaga kependidikan yang aktif menggunakan Dapodik. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana peran Dapodik dalam pemetaan kelinieritas guru muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya pada satuan pendidikan.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan yang saling melengkapi. Pertama, dilakukan dokumentasi berupa analisis terhadap data Dapodik serta telaah dokumen kebijakan pendidikan daerah yang relevan untuk memahami kondisi faktual di lapangan. Kedua, dilaksanakan analisis kebijakan pendidikan daerah, khususnya regulasi yang berkaitan dengan muatan lokal dan distribusi guru, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesesuaian kebijakan dengan realitas yang terjadi di satuan pendidikan. Dengan kombinasi kedua teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai peran Dapodik dalam pemetaan kelinieritas guru muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari dokumen maupun literatur disaring, diklasifikasikan, dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan pengembangan profesional guru serta manajemen sekolah. Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, di mana peneliti mengaitkan hasil analisis dengan teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berperan penting dalam memetakan kelinieritas guru muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata

pelajaran yang diajarkan. Pembahasan menekankan perlunya kebijakan afirmatif, pelatihan, dan optimalisasi Dapodik agar pemetaan lebih akurat dan mendukung pelestarian budaya lokal.

Pertama, terkait dengan ketersediaan guru muatan lokal. Hasil analisis terhadap Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memperlihatkan adanya variasi yang cukup mencolok dalam jumlah guru yang mengampu mata pelajaran muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya di berbagai satuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023). Berdasarkan Kemendikbudristek (2023), terdapat 2.417 satuan pendidikan yang memiliki guru yang mengajar Muatan Lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya yang ada di Provinsi Bali. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia, seperti Nusa Tenggara barat yang berjumlah 3.926. Hal ini berbanding lurus dengan distribusi guru yang ada di Provinsi Bali.

Pemanfaatan Dapodik dalam pemetaan guru muatan lokal memberikan informasi mengenai ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Mayoritas sekolah di wilayah kajian memang telah menugaskan guru untuk mengajar kedua mata pelajaran tersebut, namun kesesuaian latar belakang akademik guru dengan bidang yang diajarkan belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam praktiknya, tidak jarang guru dengan kualifikasi pendidikan di luar bidang, seperti lulusan Bahasa Indonesia atau Seni Rupa, ditugaskan untuk mengajar Bahasa Bali maupun Seni Budaya. Kondisi ini menegaskan adanya persoalan kelinieritas yang berimplikasi pada kualitas pembelajaran muatan lokal di sekolah.

Ketimpangan distribusi tenaga pendidik semakin jelas apabila dilakukan perbandingan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Institusi pendidikan di kota relatif lebih mudah merekrut guru dengan latar belakang akademik yang sesuai dengan bidang ajarnya, sehingga mutu pembelajaran dapat terjaga secara konsisten. Sebaliknya, sekolah-sekolah di pedesaan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sehingga harus menugaskan guru dengan kualifikasi yang tidak sepenuhnya linear untuk mengampu mata pelajaran muatan lokal. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam pemerataan kualitas pendidikan, yang berimplikasi pada efektivitas pembelajaran serta keberlangsungan pelestarian budaya lokal (Sugianti et al., 2021).

Selanjutnya adalah Kelinieritas Guru. Hasil analisis terhadap data Dapodik menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup nyata antara bidang keilmuan guru dengan mata pelajaran muatan lokal yang mereka ampu. Banyak guru yang ditugaskan mengajar Bahasa Bali maupun Seni Budaya ternyata tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan kedua bidang tersebut. Kondisi ini mencerminkan persoalan kelinieritas yang masih belum teratasi secara sistematis. Fenomena serupa juga diungkapkan oleh Fitriana dan Rahadini (2022) dalam kajian mereka mengenai muatan lokal Bahasa Jawa, di mana guru dengan kualifikasi non-linear kerap dilibatkan dalam pengajaran akibat keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang sesuai.

Pemanfaatan pemetaan kelinieritas guru Bahasa Bali dan Seni budaya menggunakan Dapodik adalah mengetahui kualitas Pembelajaran guru. Ketidakselarasan antara latar belakang keilmuan guru dengan mata pelajaran yang diampu terbukti memberikan dampak signifikan terhadap mutu proses pembelajaran. Guru yang tidak memiliki kompetensi linear sering kali mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara mendalam dan kontekstual, sehingga kualitas pembelajaran menjadi kurang optimal. Hal ini semakin krusial mengingat muatan lokal di sekolah dasar berfungsi sebagai sarana strategis dalam menanamkan identitas budaya kepada peserta didik. Nurpratiwiningsih dan Juhadi (2024) menekankan bahwa apabila pengajaran muatan lokal dilakukan oleh guru yang tidak linear, maka efektivitas pembelajaran dapat menurun dan tujuan pelestarian budaya melalui pendidikan berisiko tidak tercapai secara maksimal.

Pembahasan

Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terhadap pemetaan guru

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan nasional yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai basis informasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan (Handayani et al., 2024). Sistem ini menghimpun data komprehensif yang mencakup satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta substansi pembelajaran. Setiap lembaga pendidikan diwajibkan untuk melakukan input dan pembaruan data secara berkala sesuai dengan bukti administrasi resmi, sehingga keakuratan dan validitas informasi tetap terjaga. Dalam pelaksanaannya di tingkat sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan Dapodik, termasuk melakukan pengawasan atas proses pendataan serta menunjuk petugas khusus yang bertugas mengelola dan memastikan kelancaran penginputan data.

Keberhasilan administrasi sekolah sangat bergantung pada tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan berbagai aspek serta subsistem yang saling terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pendidikan. Dalam konteks ini, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berfungsi sebagai kerangka pendataan yang sistematis dan terstruktur, sehingga mendukung terciptanya tata kelola administrasi sekolah yang lebih terorganisir (Handayani et al., 2024). Keberadaan data pendidikan yang akurat dan terkelola dengan baik menjadi komponen esensial dalam praktik manajemen pendidikan, karena data tersebut tidak hanya berperan sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Aplikasi Dapodik berperan sebagai basis data utama yang menyimpan informasi penting mengenai siswa, guru dan tenaga kependidikan, fasilitas, serta dana pendidikan. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan program, alokasi bantuan, pengambilan keputusan, serta penilaian hasil pendidikan di tingkat sekolah maupun secara nasional. Dengan demikian, Dapodik berperan tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pengelolaan pendidikan.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berperan sebagai sumber data utama yang sangat efektif dalam mendukung perencanaan pendidikan. Hampir seluruh kebijakan strategis, seperti penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), proses akreditasi sekolah, hingga perencanaan Program Belajar Mandiri, sangat bergantung pada informasi yang dihasilkan dari sistem ini (Kirmadi et al., 2025). Fakta tersebut menegaskan posisi Dapodik sebagai instrumen yang kredibel dalam mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Dampak nyata Dapodik terhadap implementasi pendidikan tercermin dalam meningkatnya akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah diwajibkan melakukan pembaruan data secara berkala, sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik, maupun sarana prasarana pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa sekolah yang konsisten memperbarui data Dapodik memiliki tata kelola yang lebih sistematis dan terorganisir dibandingkan dengan sekolah yang kurang memperhatikan akurasi data.

Temuan penelitian menegaskan bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berperan secara strategis dalam proses pemetaan kelinieritas guru pada mata pelajaran muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya. Melalui sistem ini, tersedia informasi yang komprehensif dan akurat mengenai jumlah tenaga pendidik, latar belakang pendidikan yang mereka miliki, serta pola distribusi di berbagai satuan pendidikan. Data tersebut memungkinkan sekolah maupun pemerintah daerah untuk mengidentifikasi secara lebih jelas kesenjangan kompetensi guru, sekaligus menyusun langkah intervensi yang relevan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Pandangan ini sejalan dengan hasil kajian Sari dan Prasetyo (2021), yang menekankan bahwa Dapodik tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat administrasi,

melainkan juga sebagai instrumen kebijakan berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan.

Proses penataan guru kontrak Bahasa Bali yang semula berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan ke Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mengatur komposisi serta distribusi tenaga pendidik di jenjang SMA/SMK. Pelimpahan kewenangan ini tidak hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan jumlah guru Bahasa Bali secara lebih proporsional di seluruh satuan pendidikan tingkat menengah atas dan kejuruan di Bali. Dengan demikian, kebijakan penataan tersebut berfungsi sebagai mekanisme harmonisasi kebutuhan tenaga pengajar dengan ketersediaan sumber daya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran muatan lokal Bahasa Bali pada tingkat SMA/SMK (Wisnu et al., 2023).

Hasil analisis terhadap kebijakan pendidikan daerah memperlihatkan bahwa regulasi mengenai muatan lokal belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kelinieritas guru. Keterbatasan sumber daya manusia membuat guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai tetap ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Kondisi ini menegaskan pentingnya integrasi antara data yang tersedia dalam Dapodik dengan kebijakan daerah, sehingga proses pemetaan kelinieritas guru dapat dilakukan secara lebih optimal. Melalui pemanfaatan data Dapodik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk merancang program pelatihan, sertifikasi tambahan, maupun rekrutmen tenaga pendidik baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan muatan lokal (Parwati, 2023).

Upaya penataan guru kontrak Bahasa Bali yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali diarahkan pada proses pemetaan kompetensi sekaligus kualifikasi tenaga pendidik di jenjang SMA/SMK (Wisnu et al., 2023). Kompetensi yang dimaksud merujuk pada kapasitas keilmuan guru sebagai lulusan program studi pendidikan Bahasa Bali, sehingga relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Adapun kualifikasi mengacu pada status kepegawaian, baik sebagai guru PNS maupun guru kontrak yang berasal dari daerah ataupun sekolah. Dengan demikian, pemetaan guru kontrak Bahasa Bali di tingkat SMA/SMK berorientasi pada pendataan menyeluruh mengenai ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, sekaligus mencatat status kepegawaian yang melekat pada setiap guru hingga saat ini.

Hubungan Kelinieritas Guru dengan Kualitas Pembelajaran

Kelinieritas guru dipandang sebagai salah satu determinan utama dalam menjamin kualitas proses pembelajaran. Guru yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu cenderung mampu menyajikan materi secara lebih utuh, mendalam, dan relevan dengan konteks. Dalam ranah muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya, keberadaan guru yang linier tidak hanya memungkinkan pengajaran aspek linguistik, tetapi juga membuka ruang bagi penyampaian nilai budaya, filosofi hidup, serta praktik tradisi yang menjadi bagian integral masyarakat Bali. Pandangan ini sejalan dengan temuan Padmini, Widiana, dan Rati (2022), yang menekankan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi budaya siswa sekaligus memperkuat identitas daerah.

Sebaliknya, guru yang tidak memiliki kelinieritas dengan mata pelajaran yang diajarkan kerap mengalami keterbatasan dalam menghubungkan materi dengan konteks budaya lokal. Pola pengajaran yang mereka lakukan cenderung bersifat umum dan kurang menekankan unsur khas yang menjadi inti dari muatan lokal. Situasi ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas pembelajaran, melemahkan motivasi siswa, serta mengurangi peran muatan lokal sebagai sarana pelestarian bahasa dan budaya daerah. Temuan Aqilah et al. (2024) menegaskan bahwa kelinieritas guru memiliki korelasi langsung dengan mutu pembelajaran, guru yang mengajar

sesuai bidang keahliannya lebih mampu merancang strategi pembelajaran yang kreatif, relevan, dan berdampak positif terhadap pencapaian prestasi siswa. Pandangan tersebut diperkuat oleh Siskawati dan Masbirotro (2025), yang menekankan bahwa kesesuaian latar belakang pendidikan guru merupakan faktor fundamental dalam menunjang kualitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

Menurut Arian et al., (2014), Seorang guru dapat dikatakan menjalankan tugas profesionalnya secara optimal apabila memiliki seperangkat kompetensi yang komprehensif. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, memahami karakteristik serta kebutuhan peserta didik, menyiapkan materi ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, serta memilih metode yang relevan dengan konteks pembelajaran. Selain itu, guru dituntut untuk mampu memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar secara efektif, melaksanakan penilaian hasil belajar secara objektif, serta menganalisis data evaluasi yang diperoleh. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga proses pembelajaran dapat terus ditingkatkan dan mutu pendidikan semakin terjamin.

Dalam ranah kebijakan muatan lokal, keterbatasan jumlah guru yang memiliki kelinieritas pada mata pelajaran muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya masih menjadi persoalan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak tenaga pendidik yang ditugaskan mengajar Bahasa Bali belum memiliki latar belakang akademik yang relevan dengan bidang tersebut. Wisnu, Purnami, dan Sari (2023) menekankan bahwa situasi ini menuntut adanya kebijakan afirmatif yang lebih terarah, antara lain melalui program pelatihan khusus, pemberian sertifikasi tambahan, serta rekrutmen tenaga pendidik baru yang benar-benar linier dengan bidang keahliannya. Langkah-langkah tersebut dipandang penting untuk menjamin kualitas pembelajaran muatan lokal sekaligus memperkuat upaya pelestarian bahasa dan budaya Bali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelinieritas guru berhubungan erat dengan kualitas pembelajaran muatan lokal. Guru linier mampu menjaga otentisitas pembelajaran, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kompetensi siswa. Sebaliknya, guru non-linier berpotensi melemahkan fungsi muatan lokal sebagai instrumen pelestarian budaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memiliki peran strategis dalam pemetaan kelinieritas guru muatan lokal Bahasa Bali dan Seni Budaya pada satuan pendidikan. Dapodik tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi, tetapi juga sebagai instrumen analisis kebijakan berbasis data yang mampu menyediakan informasi akurat mengenai jumlah guru, latar belakang pendidikan, serta distribusi mereka di sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kelinieritas guru masih rendah, dimana banyak guru yang ditugaskan mengajar muatan lokal tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembelajaran, karena guru non-linier cenderung menyampaikan materi secara umum tanpa mengaitkan dengan konteks budaya lokal. Sebaliknya, guru linear mampu mengintegrasikan aspek linguistik dan nilai budaya sehingga pembelajaran lebih bermakna dan berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya.

Dengan demikian, diperlukan integrasi antara data Dapodik dan kebijakan pendidikan daerah untuk meningkatkan efektivitas pemetaan kelinieritas guru. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data Dapodik sebagai dasar dalam merancang program pelatihan, sertifikasi tambahan, serta rekrutmen guru baru yang sesuai dengan kebutuhan muatan lokal. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pembelajaran berbasis kearifan lokal, menjaga keberlangsungan bahasa dan budaya Bali, serta meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

REFERENSI

- Aqilah, A. S., Latifah, Z. K., & Kholik, A. (2024). *Analisis mutu pembelajaran berdasarkan linieritas keilmuan guru bidang studi*. Karimah Tauhid, 3(4), 4618–4629.
- Arfin, A., Jopang, J., Upe, A., & Dasmin, D. (2025). *Analisis akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar pengambilan keputusan pada satuan pendidikan jenjang SMP di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 12(2), 45–56.
- Ariani, N. W., P., Yudana, I.M., & Atmajaya, N.B. (2014). Kontribusi penerapan supervisi akademik, pengembangan sumber daya sekolah dan komitmen kerja terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Negeri Segugus Sukawati VI Kabupaten Gianyar. *Jurnal Administrasi Pendidikan UNDIKSHA*, 5(1).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Laporan Implementasi Dapodik Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Padmini, N. M. W., Widiana, I. W., & Rati, N. W. (2022). *Mini Web Linktree berbasis kearifan lokal Bali untuk meningkatkan literasi budaya siswa*. International Journal of Educational Policies, 5(1), 39–49.
- Padmini, N. M. W., Widiana, I. W., & Rati, N. W. (2022). *Mini Web Linktree berbasis kearifan lokal Bali untuk meningkatkan literasi budaya siswa*. International Journal of Educational Policies, 5(1), 39–49.
- Parwati, S. A. P. E. (2023). *Kelayakan buku pelajaran muatan lokal bagi siswa kelas atas di SD Negeri Denpasar*. Medan Makna, Balai Bahasa Bali.
- Parwati, S. A. P. E. (2023). *Kelayakan buku pelajaran muatan lokal bagi siswa kelas atas di SD Negeri Denpasar*. Medan Makna, Balai Bahasa Bali.
- Ramadhan, M., & Riyadi, S. (2025). OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA PTK BERBASIS SIMPEG DAN DAPODIK DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(6), 1125-1137.
- Sari & Pratama. (2021). Kendala Operator Sekolah dalam Implementasi Dapodik di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(3), 211–225.
- Semadi, A. A. G. P. (2021). *Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Bali dengan Pendekatan Komunikatif*. Universitas Dwijendra.
- Siskawati, G., & Masbirorotni. (2025). *Pentingnya linearitas latar belakang pendidikan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran*. Jurnal Niara, 18(1), 33–45.
- Sugianti, S., Santi, S., & Rositah, R. (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Penerapan Muatan Lokal dan Keterampilan sebagai Mata Pelajaran*. Jurnal Mappesona, IAIN Bone.
- Wisnu, I. W. G., Purnami, I. A. P., & Sari, N. P. D. (2023). *Pemberdayaan guru Bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali*. Jurnal Kelola, 10(1), 1–252.
- Wisnu, I. W. G., Purnami, I. A. P., & Sari, N. P. D. (2023). *Pemberdayaan guru Bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali*. Jurnal Kelola, 10(1), 1–252.